

# **PROBLEMATIKA POLITIK ISLAM: ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS PERSPEKTIF MUHAMMAD SAID AL-'ASMAWI**

Suis

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak;** Diskusi mengenai hubungan agama dan politik adalah perbincangan yang sulit disudai. Ini terjadi disebabkan kedua term itu memiliki akar yang berbeda. Jika agama dianggap sakral sebab memang bersumber dari wahyu sementara politik adalah bersumber dari pikiran manusia yang mengutamakan kebutuhan yang dihadapi dalam realitas kemanusiaan. Bagi Muhammad Said al-Asmawi, hubungan politik dan Islam harus ditempatkan sebagaimana mestinya dengan tetap melihat kekhasan yang dimilikinya. Apapun yang dilakukan kelompok yang mendukung formulasi politik Islam yang ideal ternyata hanyalah jargon ideologis semata bukan menimbang kepentingan besar umat Islam. Hal ini, dalam kenyataannya perbedaan konsep politik Islam terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Faktor ideologi sebuah negara menjadi penentu perbedaan itu terjadi sehingga akan lebih baiknya kemudian hubungan formulasi hubungan Islam dan politik tidak hanya dilihat secara formil. Tapi, yang terpenting substansi nilai-nilai Islam hadir dalam setiap momentum-momentum politik. Kalau hal ini tidak diindahkan tegas Said al-Asmawi, dengan memaksakan agama hadir secara formil dalam ranah politik Islam dimungkinkan terjadi pengebirian Islam itu sendiri. Alih-alih Islam hadir untuk kebaikan semua, keberadaannya akan selalu dijadikan alat pembenar bagi setiap kebijakan politik sehingga tidak heran, misalnya yang dilakukan kelompok fundamentalis, kekerasan politik selalu dilegalkan oleh pesan-pesan keagamaan yang ditafsirkan kurang tepat sesuai dengan ideologinya. Karenanya, sekali lagi, Said al-Asmawi menolak keras pemaksaan Islam dalam ranah politik, demi kemaslahatan kemanusiaan sesuai dengan tujuan Islam itu hadir dalam ruang kemanusiaan.

**Kata Kunci:** Politik, Islam, ideologi, realitas

## Pendahuluan

Mengurai hubungan politik dan Islam adalah sebuah dialektika wacana yang tidak kunjung disudai, jika tidak mengatakan berhenti. Ini terjadi sebab perbincangannya telah memakan waktu yang cukup lama sejak permulaan Islam hingga era terkini yang dikenal dengan era posmodern. Bukan hanya itu pergolakan sekitar wilayah tersebut sepanjang sejarah -selalu-mengarah pada apa, yang disebut Ernert Gellner, sebagai kenyataan oposisi biner.<sup>1</sup> Akibatnya, diantara umat Islam sendiri larut dalam perdebatan hingga tidak jarang dalam konteks praksis perdebatan itu mengarah pada tindakan nyata dan saling menebarkan teror baik teror pemahaman, seperti tuduhan kafir, atau teror fisik.

Bermula dari wafatnya nabi Muhammad Saw. persoalan politik dalam dunia Islam bergulir seiring tiadanya mekanisme yang diwariskan olehnya, terkait dengan kelanjutan pemegang tertinggi atau komando teratas umat Islam. Tidak lama setelah wafatnya Nabi, persoalan kekuasaan menjadi tema yang cukup nyaring diteriakkan antar para sahabat hingga menyebabkan titik awal munculnya embrio keretakan umat Islam. Sungguh persoalan kekuasaan, apalagi dalam konteks politik, menjadi salah satu penyebab antar umat Islam terpolarisasi dalam kelompok yang beragam, meskipun sebenarnya tidak sedikit persoalan ini juga menggunakan otoritas tafsir keagamaan sebagai pembenar atas sikap politik tertentu.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan era *khulafa' al-rashidin* mengalami dinamika yang cukup kuat bahkan menyebabkan terjadi kontestasi di internal dunia Islam hingga

---

<sup>1</sup> Oposisi biner yang dimaksud adalah para pemikir –sekaligus partisannya– selalu berada dalam kondisi saling bertabrakan sesuai dengan kerangka gerak dalam memahami dialektika Islam dan Politik. Di satu pihak ada kelompok yang kuat menggunakan rasio dan juga ada kelompok yang kuat melihat dari perspektif keimanan, meskipun juga diakui Gellner saat ini posisi tersebut semakin melebar bukan sekedar dua kelompok tapi telah beragam, lihat Ernest Gellner, *Menolak Posmodernisme; Antara Fundamentalisme Rasional dan Fundamentalisme Religius*, Terj. Hendro Prasetyo dkk (Bandung: Mizan, 1994), 11

memunculkan polarisasi sikap dalam memahami kekuasaan.<sup>2</sup> Kenyataan ini nampak sekali dari era kekuasaan Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Ustman ibn 'Affan dan 'Ali Ibn Abi Talib yang masih dianggap banyak menciptakan persoalan bahkan menuai beban psikis umat Islam sebab dalam proses peralihan kekuasaan diantara mereka selalu diiringi berbagai intrik bahkan mengarah pada situasi ber"darah-darah".

Realitas regulasi kekuasaan antar para shabat dapat disimpulkan dengan mengutip perkataan Mahmud Ismail dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi*, bahwa tradisi hukum dan politik yang dibangun era *khulafa al-rashidin* selalu mengalami perbedaan sebab sesuai dengan karakternya bahwa politik adalah persoalan dunia. Dan dunia senantiasa mengarah pada titik perubahan.<sup>3</sup> Dari pemahaman ini maka sebuah keniscayaan kemudian polarisasi dalam memahami hubungan Islam dan politik tidak bisa dihindarkan bahkan dinegara Arab sendiri yang nota benanya merupakan asal mula pertumbuhan Islam terjadi perbedaan yang cukup mencolok karakteristik yang dimiliki, misalnya negara Islam Iran yang salah satu cirinya mengutamakan para Mullah sebagai penentu kebijakan, negara Islam Saudi Arabia dengan sistem kerajaan dan lain-lain.

Perbedaan dalam menyikapi hubungan Islam dan politik disinyalir juga tidak adanya otoritas yang dapat mengganti posisi setelah Nabi meninggal. Peralihan, kondisi bermula dari perbedaan dalam memahami teks-teks keagamaan hingga pada tindakan riil yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam perebutan

---

<sup>2</sup> Polarisasi ini tidak saja terjadi dalam konteks kekuasaan politik, tapi juga mengarah pada polarisasi pemahaman keagamaan hingga, misalnya dalam konteks teologi muncul Mu'tazilah, Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Khawarif dan seterusnya. Atas alasan ini, maka tidak salah kemudian Muhammad Abu Zahro mengatakan Bahwa "Thabi'ah al-Siyasah al-Islamiyyah Dzatu shila bi al-Din" (karakter politik Islam senantiasa bersambung dengan agama". lihat, Mu}ammad Abu Zahro, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Aqidah wa tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, Tth), 31

<sup>3</sup> Bukan hanya itu, kondisi ini juga terjadi pada era kekuasaan setelahnya hingga tidak jarang antar umat Islam konflik hanya sekedar faktor merebut kekuasaan, lihat Mahmud Ismail, *Islam al-Siyasi al-Ushuliyyin wa al-'Almaniyin* (Kuwait: Muassasah al-Syira' al-'Arabi, 1993), 88-89

kekuasaan dengan nyata interpretasi atas agama tidak sedikit digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, meskipun jika dipahami langkah ini sebenarnya semakin mempersempit ruang jangkauan nilai-nilai agama terhadap berbagai kasus kemanusiaan yang tidak terjebak pada kekuasaan tertentu.

Pergolakan Islam dan politik selalu mewarnai perkembangan kehidupan umat Islam hingga kini. Munculnya diskusi-diskusi tentang nasionalisme, demokrasi dan lain-lainnya, juga turut menguak persoalan baru mengenai keterkaitan Islam dan politik serta menjadi wacana yang cukup santer –tidak pernah berhenti- dibincangkan diantara para pemikir Islam apalagi jika bersentungan dengan ideologi sebuah bangsa yang selalu hadir dalam perbedaan sesuai dengan tuntutan nilai sosial dan budayanya.

Dalam perkembangannya dialektika wacana politik dan Islam meniscayakan munculnya pandangan dan teori yang beragam. Ada kelompok yang menghendaki keduanya tidak boleh dipisahkan sebab politik adalah Islam dan Islam adalah politik, maka tidak mungkin Islam berkembang dengan baik tanpa ada kekuasaan yang diandalkan. Sementara di tempat yang berbeda ada kelompok yang berpandangan bahwa politik dan Islam harus dipisahkan sebab keduanya memiliki karakternya masing-masing. Politik bersumber dari nalar dan bersifat keduniaan, sementara Islam berurusan dengan akhirat dan bersifat sakral. Maka memaksakan Islam dalam ranah politik akan membawa dampak buruk yang tidak sedikit, misalnya mudahnya muncul legitimasi keputusan politik -yang tirani- melalui teks-teks keagamaan.

Bagi kelompok pertama, menggunakan al-Qur'an dan hadith sebagai landasan dalam kehidupan bernegara adalah sebuah keharusan. Pasalnya, penegaan syariat ini akan tampak nyata, jika undang-undang berpolitik merucut secara tekstual kepada dua sumber fundamental dalam Islam. Sementara, bagi kelompok kedua lebih melihat sumber-sumber ini dari perspektif substantif

sehingga perwujudannya dalam mengaitkan hubungan Islam dan politik menuntut tidak sama sebab dikaitkan dengan konteks realitas sosial dan budaya masyarakatnya.

Kehadiran dua kelompok ini mewarnai pergolakan Islam dan politik sesuai dengan tekanannya masing-masing. Jika yang pertama lebih berpihak pada nalar skriptual dan tekstual, maka kecenderungannya lebih bisa menolak model-model nalar politik kontemporer, semisal isu-isu demokrasi dan nasionalisme. Dan yang kedua, lebih bisa menerima mengingat ia selalu mendekati Islam dengan logika substansi sehingga sangat mudah berdialektika dengan prinsip politik yang berkembang dari Barat seperti soal demokrasi.

Dialektika Islam dan politik adalah dialektika yang tiada henti bahkan selalu menarik kesimpulan terbaru seiring dengan posisi umat Islam di tengah pergolakan politik dari tingkat nasional hingga global. Karenanya, tulisan ini hadir untuk mengupas mengenai hubungan Islam dan politik serta isu-isu yang berkisar diantara keduanya menurut pandangan Muhammad Sa'id al-'Asmawi, salah satu pemikir Islam kontemporer Mesir, khususnya dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi*.

### **Sekilas Biografi Al-'Asmawi**

Muhammad Sa'id al-'Asmawi, yang selanjutnya disebut Sa'id al-'Asmawi, lahir pada tahun 1932. Lulus dari sekolah hukum Universitas Kairo pada tahun 1954, salah kampus terkemuka di Mesir yang konon banyak melahirkan pemikir-pemikir Islam yang handal, liberal dan kompeten dalam bidangnya. Sebut saja diantaranya Amin Khuli, Taha Husain, Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain.

Setelah secara akademik tercatat lulusan sebagai ahli Hukum, Sa'id al-'Asmawi lantas terjun dalam ranah praksis persoalan-persoalan hukum sebagai konsekwensinya atas kemampuannya memahami materi-materi hukum. Tidak sia-sia upaya yang dilakukannya cukup menuai hasil hingga Sa'id al-'Asmawi tercatat

sebagai asisten pengacara dan kemudian jaksa wilayah di Alexandria. Ia diangkat hakim pada tahun 1961 dan meningkat menjadi Kepala Pengadilan Tinggi, Pengadilan Pidana Tinggi dan Pengadilan Tinggi Keamanan Negara. Maka tidak heran Sa'id al-'Asmawi kemudian lebih dikenal, khususnya di kalangan civitas Universitas Kairo, sebagai pemikir yang bukan saja paham atas logika-logika hukum Islam, tapi juga memahami logika-logika perbandingan hukum diberbagai belahan dunia.

Sebagai bentuk kesungguhannya dalam dunia hukum dan untuk menambah pengetahuannya mengenai seluk beluknya, Sa'id al-'Asmawi Tahun 1978 melakukan penelitian terkait dengan problematika hukum formal di Harvard Law School dan juga di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Dari aktivitas ini nampak bahwa pergolakan keilmuan yang dialami Sa'id al-'Asmawi cukup kompleks tidak hanya bergaul dengan referensi-referensi yang berasal dari dunia Islam sebagai sumber hukum Islam, tapi juga referensi-referensi dari Barat yang konon lebih menimbang pada pendekatan rasional dan kemanusiaan.

William E. Shepard, salah satu dosen senior dalam studi keagamaan, menyebutkan bahwa Sa'id al-'Asmawi adalah termasuk tokoh ahli hukum yang terlibat larut dalam perbincangan mengenai berbagai wacana, khususnya mengenai moralitas baik yang bersumber dari Islam atau Barat. Keterlibatan ini sebenarnya, tegas E Shepard, sebagai kelanjutan dari pewarisan intelektual yang pernah dimarakkan oleh Muhammad Abduh dengan semangatnya menggunakan rasionalitas dalam memahami agama, 'Ali Abd al-Raziq dengan tesis bahwa khilafah Islamiyah tidak dikenal dalam dunia Islam,<sup>4</sup> dan lain-lain.<sup>5</sup>

Dari biografi singkat ini, dapat dipahami bahwa Sa'id al-'Asmawi merupakan tokoh ahli hukum yang memiliki hubungan

---

<sup>4</sup> Tesis ini dapat dilihat lengkapnya di 'Ali 'Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Al-Ushul al-Hukm* (Mesir: Dar al-Hilal, 1925).

<sup>5</sup> Lihat, William E. Shepard, "Muhammad Sa'id Al-'Asmawi And The Application of The Shari'ah In Egypt" di *International Journal of Middle East Studies* Vol. 28, No. 1 (Amerika: Cambridge University Press, 1996), 39-58

yang cukup luas. Kondisi ini yang memungkinkan mewujudkan terbangunnya dua nalar yang tumbuh dalam diri Sa'id al-'Asmawi. *Pertama*, dengan intensitasnya bergumul melalui kajian hukum dalam perspektif Islam, Sa'id al-'Asmawi memiliki kepiawaian untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok Islam, baik dari kalangan rasional hingga fundamentalis, bahkan sampai pada titik saling berargumentasi sesuai dengan pemahamannya mengenai hukum Islam berdialog dengan kenyataan umat Islam terkini.

Sementara, yang kedua, dengan jalinan hubungan tanpa tapal batas dan berkomunikasi intens dengan keilmuan yang berkembang di Barat, memungkinkan Sa'id al-'Asmawi dapat mengenal logika-logika hukum yang bersumber dari orang lain (Barat). Hal ini misalnya, Sa'id al-'Asmawi mengenal dengan cukup piawai mengenai undang-undang hak asasi manusia (HAM) yang notabenehnya bersumber dari diskusi-diskusi hukum di belahan dunia Barat.

### **Politisasi Agama; Sebuah Problem**

Mengaitkan politik dan agama (Islam) adalah bukanlah persoalan mudah bahkan lebih sering menimbulkan problem sebab keduanya memiliki karakternya masing-masing, misalnya politik bersifat keduniaan dan profan sementara agama bersifat akhirat yang sakral. Bagaimana ini terjadi sebab secara khusus Islam sendiri juga mengalami problem keberagaman tafsir apalagi jika dikaitkan dengan realitas politik. Makanya, tidak heran kemudian Umar Ibn Khattab, sebagaimana dikutip Sa'id al-'Asmawi, suatu ketika juga turut heran atas kondisi umat Islam yang terpolarisasi padahal agama dan nabinya mereka satu?<sup>6</sup> Tapi, itulah kenyataan yang harus dihadapi sekalipun manusia beragama dalam satu sumber pada titik riil pemaknaan atasnya

---

<sup>6</sup> Ungkapan Umar seraya dijawab oleh ibn Abbas "al-Qur'an diturunkan kepada kita. Lantas dibaca dan kitapun dipahami sesuai latar urunya. Suatu saat setelah kita, ada kaum yang membaca al-Qur'an, namun mereka tidak paham sebab musababnya hingga terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada saling membunuh". Lihat teks lengkapnya di Muh}ammad Said Al-'Asmawi, *Al-Islam al-Siyasi* (Kairo: Madbuli al-Shaghir, tth), 172

akan beragam sesuai dengan kecenderungan pemeluknya mendekati agama.

Pada perbincangan awal mengenai politik Islam dengan tegas Sa'id al-'Asmawi mengatakan sebagai berikut:

“Allah menghendaki Islam sebagai agama, sementara manusia menghendakinya sebagai politik. Agama berdimensi umum bagi segenap manusia, sementara politik berdimensi terbatas atas unsur-unsur kabilah, tempat dan waktu”.<sup>7</sup>

Pernyataan ini nampaknya menjadi salah satu kata kunci dari sikap Sa'id al-'Asmawi dalam membicarakan relasi Islam dan politik. Islam sebagai agama menghendaki manusia di bumi ini bersikap lemah lembut tanpa penuh dengan kekerasan apalagi juga Tuhan penuh dengan sifat lembut dan kasih sayang, sementara politik tidak sedikit memberikan dampak terpuruk dalam manusia dalam berbagai kondisi. Jadi, membiasakan sikap politik dengan mengatasnamakan agama akan mudah menyebabkan peperangan sebab Islam sebagai agama telah menjadi ideologi tertentu untuk kepentingan tertentu pula, yang dipastikan ada ideologi lain dengan kepentingannya yang juga berbeda.

Penempatan agama sebagai ideologi, jika dipahami akan mengantarkan pada satu titik sikap yang memaksakan agama sekedar sebagai kepentingan sesaat. Padahal, Islam sebagai agama bukan hanya melihat kepentingan manusia sesaat di dunia tapi juga kepentingan suatu saat nanti (baca:akhirat). Kenyataan ini nampak dari apa yang terjadi dan dialami gerakan fundamentalis di berbagai belahan dunia, yang sering kali berteriak atas nama Islam, tapi kenyataan di lapangan dakwah yang dilakukan sering menggunakan teror. Teror-teror ini terjadi dalam praktek-praktek pergolakan wacana di satu sisi dan teror fisik sebab pandangan

---

<sup>7</sup> Ibid, 17

fundamentalis cukup keras melihat kelompok lain yang tidak memiliki kesamaan dalam ideologi politik.<sup>8</sup>

Terkait dengan sejarah kekuasaan era Nabi Muhammad Saw., jika dianggap sebagai kekuasaan politik, Sa'id al-'Asmawi mengomentari bahwa pemerintahannya adalah kekuasaan yang tumbuh dari nilai-nilai agama dan dibangun di atas dasar-dasar moralitas. Ia tidak sampai selamanya pada satu tahapan-tahapan politik apalagi kondisi politik sebagaimana dipahami secara umum. Pemerintahan nabi merupakan pemerintahan khusus yang tidak diperlakukan, kecuali dalam keadaannya sebagai nabi. Itu artinya, pemerintahan yang dibangun oleh nabi harus dimaknai lahir dari keberadaannya sebagai nabi yang mendapat mandat pengetahuan melalui wahyu Allah Swt.

Pendapat ini, jika dikaitkan dengan pemikiran Jamal Al-Banna yang juga salah satu pemikir Mesir, misalnya, memiliki sedikit kemiripan, khususnya dalam memberikan penilaian atas sejarah kekuasaan era nabi Muhammad Saw. Komentar Jamal tentangnya dengan jelas digambarkan bahwa kekuasaan era nabi bukanlah kekuasaan negara sebagaimana negara pada umumnya. Ada karakteristik kekuasaan nabi yang sangat mungkin tidak terulang bagi generasi setelahnya, yaitu bahwa kekuasaan nabi di Madinah menempatkan dirinya sebagai *public figure* yang senantiasa mendapat bimbingan dari wahyu ilahi.<sup>9</sup> Artinya, kekuasaan nabi dibangun di atas kondisi psikis umat menjadikan nabi sebagai sentral pada persoalan umat apalagi beliau juga menjadi penyambung pesan Tuhannya. Kondisi ini yang

<sup>8</sup> Pergolakan kelompok fundamental dalam kancah perbincangan Islam dan politik lebih mengembangkan nalar tekstual dalam memaknai pesan-pesan keagamaan. Sebut saja diantara kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Maududi, Sayyid Qutub dan lain-lain. Lebih lengkapnya mengenai perbincangan fundamentalis lihat, Husain Sa'ad, *Al-Ushuliyah al-Islamiyyah al-'Arabiyyah Al-Mu'asirah Bayn al-Nas al-Thabit wa Al-Waqi' al-Mutaghayyir* (Beirut; Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 2006), dan Ali Syuaibi, *Meluruskan Radikalisme Islam* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010).

<sup>9</sup> Jamal Al-Banna, *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, Terjemahadi Sunardi Dkk (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 4-5

kemudian sekalipun nabi berpotensi salah dalam mengatur sebuah kekuasaan tertentu, tapi langsung mendapat bimbingan dari-Nya.

Meskipun dari itu, Sa'id al-'Asmawi menyadari bahwa gerakan yang menghendaki adanya pemerintahan Islam (*al-hukumah al-Islamiyah*) cukup kuat dan berkembang mewarnai perpolitikan di dunia Islam bukan hanya di negara yang mayoritas muslim tapi juga di negara-negara lainnya. Hal ini, menurutnya, disebabkan beberapa persoalan yang melatar belakangi hingga tiada henti isu-isu ini selalu bergulir.

*Pertama*, terkait dengan berdirinya negara Pakistan. Konon keberadaan negara Pakistan berdekatan dengan negara India dengan perbedaan yang sangat mencolok. Islam, sebagai agama mayoritas Pakistan, adalah agama akidah yang menjunjung tinggi keesaan sekaligus menjadi identitas kultural dengan batasan-batasan yang mengikat. Sementara Hindu sebagai agama mayoritas India adalah agama yang memuat perundang-undangan yang terbuka. Negara India dapat menyatukan agama dan nasionalisme, sementara Islam sebagai agama sepintas dipahami bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Kondisi ini yang kemudian Pakistan menegaskan identitasnya dengan menjadikan Islam sebagai ideologi negaranya terkesan menghampiri kesamaan perspektif dengan agama Hindu yang di anut oleh negara India.

Pendirian Pakistan sebagai salah satu negara yang mendengarkan shari'at Islam bila dipahami berkaitan dengan kondisi lokalnya sebagai potret yang berada pada posisi biner dengan negara India yang memakai prinsip-prinsip agama Hindu.

*Kedua*, berdirinya negara Israel. Memang berdirinya negara yahudi Israel, pada 15 Mei 1948, di sekitar wilayah negara Arab menumbuhkan konflik yang tidak pernah berhenti diantara mereka bahkan menjadi simbol kekejaman kaum zionis atas hak-hak sipil, khusus mereka yang ada di negara Palestina. Kedatangannya menjadi ancaman tersendiri bagi dunia Arab apalagi pendirian Israel didukung oleh negara sekutu yang

dikomandani Amerika dan Inggris. Kondisi ini yang mengakibatkan munculnya pemikiran-pemikiran yang larut mewacananya isu-isu nasionalisme Arab dan nasionalis Islam sebagai usaha membangun langkah dan sekaligus sebagai taktik baru menyatukan negara-negara Arab untuk membendung hegemoni kekuasaan Israel yang sulit dibendung dan mengancam sistem kenegaraan di timur tengah.

Keterlibatan sekutu dalam mendirikan negara Israel diyakini sebagai strategi kalangan Yahudi untuk memonitori kondisi riil wilayah Arab yang secara ekonomis sangat jelas dengan penghasilan minyaknya yang melimpah sehingga Barat memiliki kepentingan untuk mengawal setiap regulasi.

*Ketiga*, maraknya berbagai kerusakan dalam kehidupan manusia. Hampir dalam setiap waktu, tempat dan masyarakat ditemukan berbagai dekadensi moral. Yang menjadi perdebatan bukan adanya dan tidak adanya kerusakan itu, tapi lebih melihat kerusakan itu dalam konteks kualitatif maupun kuantitatif. Dalam berbagai negara Islam, misalnya, ada yang menggunakan undang-undang berbasis sosialis dengan harapan adanya perbaikan hidup, tapi nyatanya malah menciptakan munculnya kekuasaan tirani gaya baru yang tidak menggunakan harta publik untuk kepentingan umum melainkan kepentingan bergulir pada beberapa orang tertentu. Akibatnya, kerusakan moral terjadi dimana-mana hingga level tertinggi dan terendah. Sulit membedakan kemudian antara yang memiliki integritas moral dan menjadikannya sebagai peringatan yang begitu kuat kepada tindakan amoral yang dilakukannya

Dari sini maka muncul pandangan yang mengatakan bahwa solusi yang terbaik mengatasi kerusakan itu tidak lain adalah adanya pemerintahan Islam yang menjadikan teks-teks agama sebagai pertimbangan pokok dalam mencetuskan keputusan hukum di sekitarnya, baik hukum perdana atau perdata. Dan ini salah satu obat penyembuh paling efektif bagi munculnya kekerasan dan penyempitan peranan pengawasan pada diri dan

keluarganya. Baginya, Islam adalah solusi bagi semua problem kehidupan hingga hirup pikuk maraknya ketimpangan moral.

Terkait dengan semangat mendirikan negara Islam dengan isu penegakan syariat Islam dan Khilafah Islamiah, lahirlah kelompok-kelompok fundamentalisme di berbagai belahan dunia. Kata fundamentalis sebenarnya dalam coretan sejarah telah ada dalam tradisi perkembangan agama Kristen, yaitu kelompok yang cukup getol meneriakkan pentingnya kembali pada dasar terpokok ajaran agama Kristen. Sementara itu, istilah fundamentalis dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan *al-ushuliyyun*.

Fundamentalisme menolak keras pelunakan pandangan keagamaan. Fundamentalisme terdapat dalam banyak hal, meskipun tidak dengan kekakuan yang sama. Dan era terkini dikesankan bahwa fundamentalisme cukup kuat terdapat dalam Islam.<sup>10</sup> Asumsi ini diakui juga tidak lepas dari peran media massa yang cenderung dikuasai oleh Barat hingga tidak jarang kemudian Barat memberikan asumsi negatif atas kondisi kelompok fundamentalis yang cenderung menebar teror keberbagai kelompok kemanusiaan. Namun, juga harus diakui kelompok-kelompok fundamentalis tidak mau berubah bahkan menyadari berbagai teror yang dilakukan telah mengancam sendi-sendi kemusiaan. Akibatnya, kelompok-kelompok seperti ini menjadi cukup menarik dibicarakan apalagi bila dikaitkan dengan kajian mengenai hubungan politik dan Islam.

Kelompok fundamentalis ini dalam perkembangannya, sebagaimana disebutkan Sa'id al-'Asmawi terbagi menjadi dua, yaitu Fundamentalisme Rasional dan Fundamentalisme gerakan. Perbedaan ini nampak dari setiap aksi yang dilakukannya antara mereka yang mengutamakan tindakan melalui perang wacana dan melalui aksi gerakan.

---

<sup>10</sup> Gellner, *Menolak Posmodernisme..*, 15

Yang dimaksud dengan fundamentalisme gerakan adalah kelompok yang mengikuti teorisasi negara Islam dan larut dalam konteks gerakan politik yang berusaha mendirikan negara Islam dan penegakan syari'ah islamiyah. Sebagai usaha mewujudkannya berbagai langkah dilakukannya dalam berbagai fenomena kemanusiaan.

Sementara itu fundamentalisme rasional adalah kelompok yang mempunyai tujuan agar kembali pada dasar-dasar pokok pemahaman Islam sebagaimana menjadi spirit umat Islam awal dengan landasan mengikuti anjuran perintah-Nya serta hadith nabi di satu pihak dan dipihak yang berbeda menjadikan pemahaman ini sebagai gerak pembaharuan kehidupan spiritual bagi umat Islam. Pemahaman ini yang kemudian, problematika konteks kesejarahan, sosilogi dan budaya bukan menjadi tema penting dalam mengaitkan pemahaman al-Qur'an dan Hadith sehingga pemahamannya cenderung bersifat literal dan tekstual.

Apa yang dilakukan fundamentalis rasional lebih menitik beratkan pada pergolakan dialektika antar pemuka agama dalam menyikapi berbagai problem kemanusiaan. Pasalnya, mereka jarang mengenakan prinsip-prinsip idealis yang mengaitkan diskusi Islam dan politik dengan al-Qur'an dan hadith.

Namun, kedua model fundamentalisme ini, sebagaimana ditegaskan Sa'id al-'Asmawi, memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Di antaranya., stilistika-stilistika (uslub) dalam memahami al-Qur'an, metode yang diikuti dalam menafsirkan al-Qur'an, perundang-undangan dalam kehidupan, pemahaman peradaban bagi sebuah agama dan meletakkan otoritas politik dalam agama.<sup>11</sup> patut dipahami bahwa perbedaan wacana sangat dimungkinkan melahirkan perbedaan sikap dalam memaknai pergolakan kehidupan manusia. Perbedaan ini nampak dalam setiap aksi dan orientasi perjuangan sekaligus dalam mengartikan Islam dalam ranah kehidupan sosial-politiknnya. Di satu pihak menghendaki

---

<sup>11</sup> Said al-'Asmawi, *Al-Islam al-Siyasi*, 171

formalisme keagamaan dan dipihak yang berbeda berjuang dalam perwujudan substansi beragama.

Pada titik kesimpulannya, tentang fundamentalis, bahwa fundamentalisme Islam bukanlah berada dalam satu teori tertentu bahkan berada dalam bingkai dua teori yang saling bertentangan dan cenderung saling konflik. Di satu pihak fundamentalisme rasional (substansial) memandang bahwa tujuannya mengarah pada gerakan salafiyah yang lebih rasionalistik untuk kehidupan spiritual dengan fokus pada tercapainya substansi agama, spirit untuk maju dan mengikuti perkembangan peradaban kemanusiaan. Dan Fundamentalisme gerakan adalah keterlibatan dalam ranah politik praksis untuk memperjuangkan spirit pemerintahan Islam dan penegakan syariah dalam pemerintahan.

Bagi Sa'id al-'Asmawi, politisasi agama perlu disudai agar tercipta kedamaian bagi semua sebagaimana substansi misi Islam itu sebagai agama bagi umat manusia, *rahmah li al-'alamin*. Senada dengan hal ini, Bassam Tibi berkomentar fundametalisme apapun garis perjuangannya bukan murni ekspresi kebangkitan agama, tapi lebih pada muatan politik sehingga jelas-jelas bertujuan politik.<sup>12</sup> Menggunakan agama sebagai legitimasi politik akan menciptakan situasi yang tidak kondusif sebab akan memungkinkan dan memudahkan lahirnya kekerasan atas nama agama yang tidak di inginkan dan senantiasa bertabrakan dengan misi awal agama yang juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Bila dilihat dari alur intelektualnya, Sa'id al-'Asmawi konon juga dikelompokkan sebagai salah tokoh liberal yang berpandangan sekuler dengan memisahkan politik dan agama (Islam). Hal ini nampak jelas dari pendapat-pendapatnya mengenai hubungan politik dan Islam yang menghendaki keduanya dipisahkan secara tegas atas nama apapun. Memang kelompok sekuler kurang srek mengintegrasikan Islam dengan politik

---

<sup>12</sup> Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan kekacauan Dunia Baru*, terj. Imron Rosyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 241

sebab keduanya memiliki ranah kepentingan yang berbeda. Tapi, tidak salah kemudian substansi nilai-nilai Islam itu layak didialogkan untuk menjadi salah satu item dan landasan dalam kehidupan berpolitik.

Paparan Sa'id al-'Asmawi dalam mendiskusikan Islam dan politik dengan jelas menginginkan agar keduanya berada dalam tempatnya masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Jika hal ini tidak diindahkan sangat dimungkinkan akan terjadi saling menuai persoalan dalam berbagai praktek berpolitik. Misalnya, penggunaan agama sebagai landasan berpolitik memungkinkan akan terjadi tarik menarik kepentingan dan agama senantiasa menjadi legitimasi tindakan berpolitik.

Sa'id al-'Asmawi cukup mengingat hubungan yang cukup dekat antara agama dan politik secara formil bukan hanya akan menciptakan kekerasan yang mengatasnamakan agama hingga akhirnya mengganggu tindakannya senantiasa dibenarkan oleh agama. padahal, kehadiran agama dalam semua ranah kehidupan manusia bukan untuk menghilangkan konteks sosial dan budayanya, melainkan menginternalisasikan nilai-nilai tauhid agar menjadi spirit dalam berkemanusiaan. Bertolak dari logika pikir Sa'id al-'Asmawi, apa yang terjadi dalam konteks kekinian dimana kelompok-kelompok Islam fundamentalis melakukan teror di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan hadirnya kelompok salafi, FPI, HTI dan lain-lain menunjukkan agama selalu sebagai pembenar atas tindakan teror dengan kerangkaian tujuan menuju apa yang disebut dengan syariat Islam dan khilafah Islamiyah.

Teror-teror yang mengatasnamakan Islam, jika dikaitkan dengan alur pandang Sa'id al-'Asmawi, membuktikan bukan menghadirkan sebuah kemaslatan bagi kemanusiaan, tapi malah ketakutan. Bukan hanya orang lain (non muslim) yang merasa tidak aman, tapi juga orang Islam yang tidak seideologi merasakan waswas sebab pandangan kelompok ini dengan keras mengecam kelompok lain yang tidak seideologis sekalipun beragama Islam.

Potret ini harus menjadi renungan bersama bila menginginkan nuana terbaik dalam mengaitkan hubungan Islam dan politik. Jika dibiarkan, Islam akan selalu dikucilkan oleh semua komunitas dunia sebab kehadirannya selalu dianggap menebarkan teror yang akhirnya memberikan perhatian pada tindakan yang berseberangan dengan nalar-nalar politik modern dengan dalih kembali pada al-Qur'an dan hadith.

Sungguh apa yang ditawarkan oleh Sa'id al-'Asmawi pada apa yang disebut dengan Islam substansi. Artinya, dalam konteks hubungan Islam dan politik ia menghendaki agar Islam secara formil tidak diseret-seret dalam ranah politik praksis. Meskipun dari itu, Sa'id al-'Asmawi menginginkan nilai-nilai Islam harus mewarnai dalam proses-proses perpolitikan, misalnya mengantarkan satu kehidupan manusia yang didasari pada prinsip keadilan, kebenaran dan lain-lain.

## **Penutup**

Dari bacaan di atas mengenai pemikiran Said al-'Asmawi ada beberapa simpulan yang perlu dituangkan:

1. Nabi Muhammad Saw. tidak mewarisi sistem pergantian kekuasaan dengan jelas. Karenanya, hal ini menjadi penyebab generasi setelahnya mencari bentuk ideal dan mengalami perbedaan sesuai dengan kondisi kultur yang dihadapinya. Dari sini, maka generasi setelahnya bebas melakukan model pemilihan dengan tetap berpatokan pada pemahaman bahwa politik menghendaki kebaikan bagi semua manusia.
2. Gerakan fundamentalisme merupakan gerakan yang konsen kembali pada hal-hal yang bersifat prinsipil. Gerakan ini kemudian terbagi pada target dua arah yang saling bertubrukan, yaitu munculnya formalisme Islam dan substansialisme dalam pemahamannya. Akibatnya, dalam berpolitik mereka senantiasa menyeret-nyeret agama sebagai legimasi atau pembenaran sikap politik mereka.

3. Politik bersumber dari pemikiran manusia, sementara Islam bersumber dari wahyu. Memaksakan politisasi agama (Islam) akan mengebiri Islam itu sendiri dalam kepentingan yang sempit, yaitu target-target politik tertentu, melupakan target yang lebih besar terkait dengan misi hakiki Islam hadir di muka bumi. Akibatnya, Islam selalu dimaknai sesuai dengan pesanan dan kepentingan politik temporal bukan menghadirkan Islam sebagai agama yang mengantar kebaikan manusia baik di ranah kehidupan dunia maupun akhirat.

## Daftar Pustaka

- Al-Banna, Jamal, *Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, Terj. Jamadi Sunardi Dkk. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Abd al-Raziq, 'Ali, *Al-Islam wa al-Usul al-Hukm*. Mesir: Dar al-Hilal, 1925.
- E. Shepard, William "Muhammad Sa'id Al-'Asmawi And The Application of The Shari'ah In Egypt" di *International Journal of Middle East Studies* Vol. 28, No. 1. Amerika: Cambridge University Press. 1996.
- Gellner, Ernest. *Menolak Posmodernisme; Antara Fundamentalisme Rasional dan Fundamentalisme Religius*, Terj. Hendro Prasetyo dkk. Bandung: Mizan. 1994.
- Mahmud Ismail, *Islam al-Siyasi al-Ushuliyyin wa al-'Almaniyyin*. Kuwait: Muassasah al-Syira' al-'Araby. 1993.
- Muhammad Said Al-'Asmawi, *Al-Islam al-Siyasi*. Kairo: Madbuli al-Saghir. Tth.
- Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan kekacauan Dunia Baru*, terj. Imron Rosyidi. Yogyakarta; Tiara Wacana, 2000.
- Sa'ad, Husain. *Al-Ushuliyyah al-Islamiyyah al-'Arabiyyah Al-Mu'asirah Bayn al-Nas al-Thabit wa Al-Waqi' al-Mutaghayyir*. Beirut; Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah. 2006.

Suis

Syu'aibi, Ali *Meluruskan Radikalisme Islam* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010).

Zahro, Muhammad Abu. *Tarih al-Madzahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-Aqidah wa tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr. Tth.